

5. PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat dalam penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran penelitian :

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis skalogram menunjukkan bahwa terdapat 7 Pusat pertumbuhan dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Pusat pertumbuhan tersebut memiliki skor yang paling tinggi dan fasilitas lengkap dibanding kecamatan lainnya, sehingga kecamatan ini termasuk kedalam ranking 1. Kecamatan yang termasuk kedalam ranking 1 juga dikatakan sebagai kecamatan tinggi. Pusat pertumbuhan tersebut diantaranya Kecamatan Soreang, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Cileunyi, dan Kecamatan Rancaekek. Sebagian besar kecamatan pusat pertumbuhan mempunyai jarak yang dekat dengan Kota Bandung.
2. Berdasarkan hasil analisis gravitasi, setiap pusat pertumbuhan memiliki interaksi yang berbeda dengan daerah sekitarnya (*hinterland*). Hubungan paling erat yaitu antara Kecamatan Baleendah dengan Kecamatan Bojongsoang. Selain itu, ibu kota Kabupaten Bandung yaitu Soreang mempunyai hubungan yang paling erat dengan Kecamatan Kutawaringin. Kecamatan Majalaya memiliki hubungan yang erat dengan Ciparay. Sedangkan Kecamatan Ciparay mempunyai hubungan interaksi yang sangat kuat dengan Baleendah. Kemudian, Kecamatan Rancaekek mempunyai interaksi yang kuat dengan Cileunyi. Begitu pula sebaliknya, Kecamatan Cileunyi mempunyai interaksi yang kuat dengan Rancaekek. Kecamatan Pangalengan memiliki nilai interaksi tidak jauh berbeda dengan *hinterland*-nya, nilai interaksi paling tinggi yaitu dengan kecamatan Pacet. Masing-masing kecamatan mempunyai hubungan satu sama lain, namun yang menarik adalah adanya hubungan antara pusat pertumbuhan dengan pusat pertumbuhan lainnya sebagai *hinterland*. Artinya daerah tersebut saling mendorong satu sama lain atau saling bergantung satu sama lain untuk mengembangkan wilayahnya

3. Dengan mempertimbangkan *central place theory*, hierarki perkotaan dibagi kedalam tiga bagian yaitu pusat, sub pusat 1 dan sub pusat 2. Pusat adalah wilayah yang selain memiliki fasilitas yang lengkap juga berperan sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan barang dan jasa ekonomi, wilayah tersebut adalah Soreang. Sub pusat 1 merupakan daerah yang langsung bersubordinasi dengan pusat. Karena fasilitasnya yang lengkap, daerah ini dapat membantu pengembangan wilayah sub pusat 2 dan lainnya. Sub pusat 1 yaitu Kecamatan Majalaya dan Pangalengan. Sedangkan sub pusat 2 adalah daerah sekitar sub pusat 1. Daerah sub pusat 1, berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat menunjang pemerataan pembangunan daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Agar pembangunan merata di Kabupaten Bandung maka pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan ketersediaan fasilitas baik ekonomi maupun sosial di wilayah-wilayah tertinggal atau kecamatan rendah di Kabupaten Bandung. Upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau kelancaran kegiatan perekonomian seperti perbaikan jalan dan sarana angkutan yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan interaksi antar warga di daerah.
2. Untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi terutama kecamatan rendah, diperlukan adanya kebijakan yang dapat mendorong masuknya kegiatan ekonomi (investasi) di daerah tersebut. Kegiatan tersebut dapat berupa peningkatan dan perbaikan fasilitas infrastruktur yang diperlukan, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, R. (2012). Analisis pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara. *Economics Development Analysis Journal* .
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). (2016). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Kabupaten Bandung: Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). *Kabupaten Bandung Dalam Angka*. Kabupaten Bandung: Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Danastri, S. (2011). *Analisis penetapan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kecamatan Harjamukti, Cirebon Selatan CIREBON SELATAN* . Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ermawati. (2010). *Analisis pusat pertumbuhan ekonomi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah*. Surakarta: UNIVERSITAS SEBELAS MARET .
- Farizal, F., Hidayanti, A. N., & Kuncoro, T. (2011). Penentuan Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pusat pertumbuhan (studi kasus: Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Tata Kota dan Daerah* , 3, 39-46.
- Friedmann, J. (1964). Regional development in post-industrial society. *Journal of the American Institute of Planners* , 30, 84-90.
- Higgins, B. (1972). Growth pole policy in Canada. *Growth Centers in Regional Economic Development* , 204-228.
- Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.
- Imelda, Nurjayanti, & Ochtadila, S. E. (2013). *Identifikasi pusat pertumbuhan dan daerah hinterland Kota Palembang*. Universitas Sriwijaya.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2004). *Pembangunan Wilayah : Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*. Jakarta: LP3ES.

- Parr, J. B. (1999). Growth-pole Strategies in Regional Economic Planning: A Retrospective View: Part 1. Origins and Advocacy. *Urban Studies Journal Limited* , 36, 1195-1215.
- Perroux, F. (1988). The pole of development' s new place in a general theory of economic activity, in: B. HIGGINS and D. SAVOIE. *Regional Economic Development: Essays in Honour of Francois Perroux* , 48-76.
- Pratiwi, S. (2014). *Kajian aksesibilitas terhadap ruang terbuka di perumahan terencana Kota Medan*. Retrieved December 3, 2016 from <http://www.repository.usu.ac.id>:
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/42432/7/>
- Pribadi, D. O., Putra, A. S., & Rustiadi, E. (2015). Determining optimal location of new growth centers based on LGP–IRIO model to reduce regional disparity in Indonesia. *The Annals of Regional Science* , 54 (1), 89-115.
- Puspitawati, L. T. (2013). Analisis perbandingan faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di kawasan Kedungsapur. *Economics Development Analysis Journal* .
- Richardson, H. W. (1978). Growth centers, rural development and national urban policy: a defense. *International Regional Science Review* , 3, 133-152.
- Santoso , E. B., & Rahayu, E. (2014). Penentuan pusat-pusat pertumbuhan dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Gunungkidul. *JURNAL TEKNIK POMITS* , 3, 290-295.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang, Sumatra Barat: Baduose Media.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Revisi ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Utari, E. S. (2015). Analisis sistem pusat pelayanan permukiman di Kota Yogyakarta tahun 2014. *JEJAK Journal of Economics and Policy* .
- Viduri, V., Badjuri, & Widjajanti, A. (2015). Analisis Pengembangan Wilayah Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pusat Pelayanan di Kabupaten Banyuwangi. *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015* .

Lampiran 1

Berikut ini langkah-langkah dalam analisis skalogram:

1. Kolom (1 dan 2) diisi dengan nomor urut untuk wilayah (kecamatan) dan nama-nama kecamatan yang ada di kabupaten.
2. Kolom selanjutnya (3-10) adalah kolom jenis fasilitas. Banyaknya jumlah fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial berdasarkan data dari dinas-dinas terkait.
3. Kemudian di baris paling akhir (11) ada poin yang mana poin tersebut dikalikan dengan jumlah fasilitas di setiap kecamatan. Sehingga kolom “skalogram” memperlihatkan hasil poin.
4. Kolom total merupakan total penjumlahan dari setiap poin fasilitas
5. *Rank size* diisi berdasarkan total nilai skalogram yang paling besar. Rank size ini dibagi kedalam tiga interval untuk menggambarkan kecamatan yang tertinggi, sedang dan rendah.